Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XI
Minggu ke-3 Mei
(15 s.d. 21 Mei 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SERANGAN SIBER LAYANAN PERBANKAN

Eka Budiyanti
Analis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada era digital seperti saat ini, banyak sekali terjadi serangan siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan siber dapat menyerang lembaga atau perusahaan apapun. Belum lama ini sistem perbankan salah satu bank di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami serangan siber. Hal ini menyebabkan sistem bank tersebut menjadi bermasalah dan layanan perbankan juga tidak dapat diakses oleh nasabah selama beberapa hari. BSI kemudian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan berbagai upaya untuk mengatasi serangan siber tersebut. Saat ini BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia sehingga layanan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI *Fast* beroperasi normal didukung aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kanal pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat. Pasca gangguan layanan perbankan, kegiatan perbankan BSI kembali berlangsung normal. Serangan siber terhadap BSI bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021, Bank Jatim dan BRI Life (perusahaan asuransi milik BRI) diretas dan data pribadi nasabah diduga bocor di internet. Bahkan pada awal tahun 2022 silam Bank Indonesia juga mengaku mendapat serangan *ransomware*.

Menurut Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, sistem pertahanan siber bank-bank di Indonesia cenderung tidak kuat. Gangguan layanan yang terjadi pada BSI baru-baru ini, yang diduga kuat akibat serangan siber *ransomware*, seharusnya menjadi pelajaran bagi perbankan di Indonesia. Bank-bank di Indonesia perlu memperkuat sistem pertahanan digital karena serangan siber saat ini dinilai telah menjadi semakin kompleks dan canggih. Saat Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi semua layanan perbankan untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau *cashless society*, sudah seharusnya Bank Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan siber yang sangat mungkin terjadi.

Serangan siber berpotensi menimbulkan risiko besar bagi bisnis perbankan digital. Menurut data International Monetary Fund (IMF) tahun 2020, estimasi total kerugian rata-rata tahunan yang dialami sektor jasa keuangan secara global yang disebabkan oleh serangan siber yaitu senilai USD100 miliar atau lebih dari Rp1.433 triliun. Kemudian menurut data dari Checkpoint Research 2022, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap pekannya.

Hal terpenting yang harus dilindungi saat terjadi serangan siber pada sistem perbankan adalah dana serta data nasabah, dan ini menjadi tanggung jawab perbankan dan penyelenggara sistem elektronik (PSE). Selain itu OJK juga perlu berperan aktif membantu perbankan dalam melakukan pengamanan data dari serangan siber. OJK harus menjadi *support system* yang mendukung keamanan perbankan di Indonesia. Pemerintah juga harus lebih giat dalam melindungi keamanan dan integritas data di sektor perbankan dari serangan siber digital. Tidak hanya pemerintah, seluruh pihak juga harus berkolaborasi dan saling mendukung agar pelindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal.

Atensi DPR

Kasus serangan siber yang baru saja menyerang sistem perbankan salah satu bank di Indonesia, memberikan pelajaran bahwa mitigasi terhadap serangan siber sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dana dan data nasabah. Dalam hal ini, Komisi XI DPR RI yang memiliki lingkup di bidang perbankan perlu mendorong Bank Indonesia dan OJK untuk mengevaluasi kembali mitigasi penanganan serangan siber bagi perbankan. Hal ini dimaksudkan agar ketika terjadi serangan siber, Bank Indonesia dan OJK dapat segera mengatasi hal tersebut dan meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Selain itu, Komisi XI juga perlu mendorong Bank Indonesia dan OJK untuk melakukan literasi dan edukasi kepada nasabah perbankan mengenai bahaya serangan siber dan cara menjaga keamanan data pribadi dari bahaya serangan siber.

Sumber

bbc.com, 16 Mei 2023;
katadata.co.id, 19 Mei 2023;
merdeka.com, 18 mei 2023;
sindonews.com, 17 Mei 2023
solopos.com, 16 Mei 2023; dan
tempo.co, 18 Mei 2023.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.